

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BUMN KONSTRUKSI TAHUN 2015-2021

Indra Fajar Firdiansyah^{1*}, Mustanwir Zuhri²

¹Perbanas Institute

²Perbanas Institute

Korespondensi:

mustanwir@perbanas.id

Diterima: 20 06 2023

Disetujui: 24 07 2023

Diterbitkan: 30 07 2023

Abstract

The focus of this paper is the description of financial soundness of construction SOEs which received assignments from the Government and/or carrying out tasks on National Strategic Projects (PSN). The study objects consist of PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wjaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, and PT Hutama Karya (Persero). The analysis performed by using the financial aspect assessment based on the Decree of the Minister of BUMN No. Kep-100/MBU/2002 concerning Assessment of the Healthiness Level of SOEs. The sample data used are the five construction SOEs with the period from 2015 to 2021. The results of this study indicate that the financial condition of the construction SOEs that receive Government assignments and/or work on PSN have variated conditions and generally experience a decline in the level of healthiness in 2020 and 2021. This declining of financial performance in line with the macroeconomy decline in conjunction with Covid-19 pandemic period.

Keywords: Financial soundness, Construction SOE, Decree No. Kep-100/MBU/2002

1. PENDAHULUAN

Lemahnya infrastruktur perekonomian suatu negara berimplikasi pada inefisiensi ekonomi. Lemahnya infrastruktur berdampak pada tingginya harga komoditas dan barang kebutuhan masyarakat serta dapat memunculkan ketidakadilan sosial karena perbandingan harga dari suatu tempat dibanding tempat lain tidak proporsional. Selain itu lemahnya infrastruktur, jalan misalnya, juga mempersulit sebagian penduduk mengakses fasilitas kesehatan ataupun sekolah. Biaya logistik yang mahal karena lemahnya infrastruktur jalan menjadi salah satu komponen beban yang sangat mempengaruhi harga pokok penjualan produk perusahaan, sehingga berdampak pada mahalnya harga penjualan komoditas. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa fasilitas infrastruktur yang kurang memadai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi suatu negara, termasuk Indonesia. Investor asing akan khawatir untuk berinvestasi pada negara dengan biaya logistik yang masih cenderung mahal dibandingkan dengan negara lain yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai.

Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, investasi pada infrastruktur yang baik yang dilakukan saat ini dapat membentuk perekonomian nasional serta kondisi lingkungan dan sosial yang lebih baik di masa mendatang. Dengan infrastruktur yang memadai, maka Indonesia dapat mewujudkan mimpi untuk menjadi negara maju.

Di Indonesia saat ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas nasional. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktifitas serta daya saing. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 417 triliun untuk infrastruktur pada tahun 2021. Apabila dilihat dari perkembangan belanja infrastruktur selama 9 tahun terakhir (2013-2021), dapat dilihat pada Tabel 1.1, bahwa anggaran belanja infrastruktur di Indonesia cenderung naik secara signifikan dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2015 yang

naik mencapai 65,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.1 Anggaran Belanja Infrastruktur Indonesia Tahun 2013-2021

Tahun	Anggaran Belanja Infrastruktur	Pertumbuhan (%)
2013	Rp155,9 T	
2014	Rp154,7 T	-0,8
2015	Rp256,1 T	65,5
2016	Rp269,1 T	5,1
2017	Rp381,2 T	41,7
2018	Rp394,0 T	3,4
2019	Rp394,1 T	0,0
2020	Rp281,1 T	-28,7
2021	Rp417,4 T	48,5

Sumber: Website Kemenkeu

Pertumbuhan pembangunan dan transformasi infrastruktur di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Karena masifnya kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur dan keterbatasan belanja investasi pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Maka Pemerintah Indonesia mengikutsertakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur untuk turut andil dalam pembangunan infrastruktur Indonesia melalui penugasan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembangunan infrastruktur yang ditugaskan pemerintah kepada BUMN meliputi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, sarana dan prasarana transportasi masal, tempat pelayanan umum, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain kondisi keuangan BUMN konstruksi juga memiliki keterbatasan modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ditugaskan, sehingga diperlukan pembiayaan lain dari BUMN sektor konstruksi untuk pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, peran Pemerintah juga sangat penting dalam pembangunan infrastruktur BUMN konstruksi tersebut, salah satunya andil dalam mendukung BUMN konstruksi melalui pemberian dukungan baik dari sisi fiskal maupun regulasi.

Penugasan khusus pada BUMN konstruksi oleh Pemerintah berdampak pada kinerja atau kesehatan keuangan perusahaan BUMN

dimaksud. Dengan adanya tambahan proyek penugasan khusus maka dapat meningkatkan usaha dan kinerja, dengan asumsi kondisi eksternal dan internal perusahaan mendukung. Kondisi eksternal meliputi perubahan lingkungan luar sedangkan kondisi internal di antaranya meliputi kesiapan perusahaan menerima order pesanan proyek yang besar dan berkelanjutan.

Dinarjito et al., (2018) melakukan penelitian kesehatan BUMN konstruksi yang dianalisis dengan beberapa metode dengan hasil bahwa sebagian BUMN di sektor konstruksi memiliki kondisi kurang sehat dan mengalami finansial *distress*, namun sebagian BUMN lain dalam keadaan sehat. Penelitian lain oleh Helmi & Daryanto (2020), menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja dari BUMN sektor konstruksi cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan era sebelum adanya penugasan Pemerintah. Dalam penelitian tersebut juga disampaikan bahwa hampir sebagian besar BUMN di sektor konstruksi menunjukkan hasil kinerja keuangan yang negatif, namun di sisi lain aset BUMN konstruksi menunjukkan kinerja yang positif.

Pada tahun 2020, berkaitan dengan terjadinya pandemik Covid-19, Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan penerapan PSBB menyebabkan BUMN di sektor konstruksi mengalami beberapa masalah pada kinerja perusahaan seperti adanya penundaan pengerjaan proyek karena pembatasan aktifitas dan penerapan *physical distancing*. Hal tersebut menyebabkan beberapa BUMN konstruksi tidak dapat mencapai target penyelesaian proyek sesuai yang direncanakan dan berdampak pada penundaan penagihan ke pemilik proyek. Di sisi lain, kewajiban finansial atas pinjaman dari bank atau obligasi tetap berjalan di tengah keterbatasan kas BUMN konstruksi. Hasil penelitian Tertia & Subroto (2021) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh pada kinerja BUMN sektor konstruksi khususnya BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu mengakibatkan penurunan kinerja keuangan perusahaan tersebut, disbanding periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, tulisan ini akan menganalisis dan menilai tingkat kesehatan BUMN konstruksi khususnya yang ikut serta dalam pembangunan proyek strategis nasional atau mendapatkan penugasan dari Pemerintah Indonesia yang meliputi. Penelitian ini memberikan wacana baru bahwa analisis tidak hanya menyebutkan peningkatan dan penurunan indikator kinerja tetapi juga melakukan penilaian kinerja dengan melakukan perbandingan terhadap benchmark atau tolak ukur yang ditetapkan Pemerintah, yaitu berdasar pada Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Jumlah perusahaan yang diamati sebanyak 5 perusahaan, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2. Kelima perusahaan BUMN tersebut termasuk di dalam kategori perusahaan konstruksi non infrastruktur, sesuai Keputusan Menteri No.100 sebagaimana telah disebutkan.

Tabel 1. 2 BUMN Konstruksi yang Mendapat Penugasan Pemerintah Indonesia

No.	Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	WSKT
2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	ADHI
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PTPP
5	PT Hutama Karya (Persero)	PTHK

Sumber: data yang diolah (2023)

2 KERANGKA TEORETIS

Gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan yang lengkap meliputi contoh neraca perusahaan, laporan laba rugi, adanya laporan perubahan posisi keuangan (arus kas, atau arus dana, catatan, dan laporan lain). Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2019). Laporan

keuangan adalah sebuah alat sekaligus informasi yang memiliki peran sangat penting dan krusial bagi perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis karena laporan keuangan menggambarkan perkembangan dan kesehatan suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2012). Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan atau pengguna laporan keuangan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan (efektif 1 Januari 2015), paragraph 10 disebutkan bahwa komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas selama periode;
- 5) Catatan atas laporan keuangan;

Pada PSAK No. 1 dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kieso dan Weygandt (2007) menjelaskan secara singkat bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan:

- 1) Informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit.
- 2) Informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan.
- 3) Informasi mengenai sumber daya perusahaan

Analisis Laporan Keuangan

pengertian analisis laporan keuangan adalah “Menguraikan pos – pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. (Harahap, 2008) Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih dalam informasi yang dikandung suatu laporan keuangan, sebagaimana fungsi laporan keuangan itu sendiri yaitu sebagai media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Tanpa melihat langsung ke perusahaan kita sudah bisa mengetahui keadaan dan hasil usaha dari laporan keuangan yang disusun. Jika informasi disajikan dengan benar, maka informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk pengambilan keputusan.

Badan Usaha Milik Negara

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pendirian BUMN di berbagai negara bila diteliti secara seksama sebenarnya memiliki beberapa kesamaan, salah satunya adalah sebagai *agent of development* yang memiliki kemiripan dengan tugas dari amanat pasal 33 dalam UUD 1945. Pemerintah Republik Indonesia mendirikan BUMN bertujuan untuk mendorong pengembangan perekonomian nasional, hal tersebut sebagaimana yang tertulis dalam pasal 2 Undang-Undang No.19 tahun 2003 terkait maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- 2) Mengejar keuntungan.
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Evaluasi Perusahaan

Wirawan (2011) menyatakan bahwa evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai

fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi kinerja keuangan perusahaan BUMN konstruksi yang mendapatkan penugasan Pemerintah atau mengerjakan proyek strategis nasional periode tahun 2015 – 2021 dengan menggunakan standar yang telah ada yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002.

Kinerja

Suwatno & Priansa (2011) mendefinisikan kinerja sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta perilaku dan tindakannya. Sementara itu, Prawirosentono (2008) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Prawirosentono (2008) menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja organisasi dan kinerja perorangan, diperlukan membangun standar kinerja terlebih dahulu. Kriteria standar kinerja harus jelas dan objektif, jangan memihak dan tidak pilih kasih. Setelah standar kinerja tersebut ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja yang sebenarnya telah dilakukan. Standar kinerja yang telah ditentukan, digunakan untuk dibandingkan dengan kinerja sebenarnya. Selanjutnya, dari hasil membandingkan kinerja yang telah dilakukan dengan standar kinerja, akan tercermin bagaimana kinerja organisasi tersebut. Apabila kinerja yang telah dilakukan lebih buruk dari standar kinerja, berarti perlu adanya umpan balik bagi organisasi untuk memperbaiki kinerjanya. Menurut Darsono & Ashari (2005), kinerja perusahaan adalah gambaran posisi keuangan perusahaan dan menunjukkan hasil usaha selama periode tertentu, yang diperoleh dengan melakukan analisa laporan keuangan. Untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap tingkat kesehatan perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian kinerja, maka dapat dielaborasi bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang telah dicapai dari perusahaan dan mencerminkan kondisi perusahaan pada kurun waktu tertentu. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan adalah dengan

menganalisis tingkat kinerja keuangan perusahaan.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Tingkat kinerja perusahaan merupakan kondisi atau keadaan perusahaan yang dinyatakan dengan keadaan sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Penilaian tingkat kesehatan BUMN tersebut berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002. Penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bergerak di bidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur. Sementara itu BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002, maka ditentukan bobot yang berbeda antara BUMN infrastruktur dan BUMN non infrastruktur dalam menilai keberhasilan BUMN pada aspek keuangan. Bobot untuk aspek keuangan pada BUMN non infrastruktur adalah 70, sedangkan bobot pada BUMN infrastruktur adalah 50. Tentang Penilaian tingkat kesehatan BUMN, digolongkan menjadi:

- 1) Sehat, yang terdiri dari:
AAA apabila total skor (TS) > 95
AA apabila $80 < TS \leq 95$
A apabila $65 < TS \leq 80$
- 2) Kurang Sehat, yang terdiri dari:
BBB apabila $50 < TS \leq 65$
BB apabila $40 < TS \leq 50$
B apabila $30 < TS \leq 40$
- 3) Tidak Sehat, yang terdiri dari:
CCC apabila $20 < TS \leq 30$
CC apabila $10 < TS \leq 20$
C apabila $TS \leq 10$

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2022. Bobot untuk aspek keuangan pada BUMN infrastruktur dan non infrastruktur masing-masing adalah 50 dan 70 yang mana merupakan hasil dari akumulasi dari bobot pada masing-masing indikator penilaian kinerja perusahaan. Dalam penilaian aspek keuangan BUMN, indikator-indikator yang digunakan dalam

menghitung penilaian kinerja BUMN adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. <i>Collection period</i>	4	5
6. Perputaran Persediaan	4	5
7. Perputaran total aset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total bobot	50	70

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Menurut Jumingan (2006), ROE adalah rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Sementara itu, menurut Riyanto (2001) ROE merupakan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa.

Menurut Riyanto (2001), ROI merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Sementara itu, menurut Munawir (2005) ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan. Semakin besar nilai ROI berarti semakin besar return yang dapat dihasilkan dari investasi.

Menurut Riyanto (2001), rasio kas merupakan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Sementara itu, menurut Sudarmo (2013) rasio kas adalah kemampuan perusahaan dengan membandingkan alat-alat likuid yang paling likuid yaitu uang kas dengan utang-utang jangka pendek.

Menurut Sudarmo (2013), rasio lancar adalah mengukur kemampuan perusahaan dengan membandingkan antara Current Assets dibagi dengan *Current Liabilities* untuk mengukur likuiditas perusahaan. Brigham & Houston (2012) menyebutkan bahwa rasio lancar

merupakan pembagian antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengukur seberapa likuid kewajiban lancar bila didukung oleh aktiva lancar.

Menurut Munawir (2005) rasio *collection period* atau perputaran piutang usaha menunjukkan berapa lama dana perusahaan ditanamkan dalam komponen piutang atau berapa lama periode penagihan piutang. Sementara itu, menurut Husnan (2013) *collection period* adalah rasio yang mengukur seberapa cepat piutang dilunasi dalam satu tahun.

Menurut Husnan (2013), rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengukur berapa lama persediaan barang berada di gudang. Perputaran persediaan menunjukkan seberapa efektif penggunaan persediaan perusahaan. Periode perputaran yang baik adalah yang kecil, karena menunjukkan perputaran yang tinggi.

Menurut Riyanto (2001), rasio TATO digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam satu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Rasio TATO mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aktivitynya. Semakin besar TATO yang diperoleh, semakin baik perusahaan dalam mengatur perputaran aktiva dengan pendapatan.

Menurut Jumingan (2006), rasio TMS terhadap TA digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Sementara itu, menurut Munawir (2005) menyatakan bahwa rasio TMS terhadap TA menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor.

Mengingat dalam penelitian ini objek yang dinilai merupakan BUMN Non Infrastruktur, maka metode penilaian indikator tersebut dinilai dan masing-masing bobotnya disebutkan dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 untuk BUMN non infrastruktur. Dalam hal BUMN non infrastruktur, maka total bobot standar yang digunakan sebagai pembagi pada formula tersebut adalah 70. Dengan demikian hasil perhitungan dapat diinterpretasikan berdasarkan kategori penilaian tingkat kesehatan BUMN sebagaimana tercantum pada Tabel 2.10.

Formula penentuan skor adalah sebagai berikut:

$$\text{Total Skor} = \frac{\text{Akumulasi Bobot Indikator}}{\text{Total Bobot Standar}} \times 100$$

Tabel 2. 2 Kategori tingkat kesehatan BUMN

Sehat	AAA apabila total skor (TS) > 95
	AA apabila $80 < TS \leq 95$
	A apabila $65 < TS \leq 80$
Kurang sehat	BBB apabila $50 < TS \leq 65$
	BB apabila $40 < TS \leq 50$
	B apabila $30 < TS \leq 40$
Tidak Sehat	CCC apabila $20 < TS \leq 30$
	CC apabila $10 < TS \leq 20$
	C apabila $TS \leq 10$

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Dari hasil penilaian skor dan kategori tersebut, selanjutnya dapat diketahui masing-masing tingkat kesehatan BUMN dilihat dari aspek keuangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Saladin, & Arifin (2022) menjelaskan bahwa pada tahun 2018 PT Waskita Karya (Persero) Tbk memberitahukan kinerja industri yang kurang sehat dengan pencapaian “BBB” dengan jumlah skor yaitu 53,25 dengan standar penilaian $50 < TS \leq 65$. Pada tahun 2019, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dijelaskan kurang sehat dengan penilaian “BB” di mana total skor yang diterima dari bagian keuangan adalah 42 dengan standar penjumlahan $40 < TS \leq 50$. Berikutnya pada tahun 2020 industri dikatakan kurang sehat dengan penilaian “BBB” di mana total poin yang didapatkan dari aspek keuangan ialah 50,15 dengan standar penilaian $50 < TS \leq 65$. Mencakup keseluruhan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2018-2020 penjumlahan kinerja keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami perkembangan dan pengurangan dalam kinerja keuangannya karena masih dalam keadaan kurang baik pada perkembangan kesehatan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Tertia & Subdroto (2021) menyebutkan bahwa perkembangan kinerja keuangan empat perusahaan BUMN sektor konstruksi yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk di periode

triwulanan 2016-2020 secara keseluruhan dilihat dari akumulasi bobot penilaian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid 19. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perusahaan yang dapat pulih atau sembuh dengan baik akibat dampak Pandemi Covid 19 yang menghambat kegiatan ekonomi yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang mengalami pemulihan terbaik pada masa Pandemi Covid 19 tahun 2020 di triwulan IV, kemudian disusul oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan di posisi terbawah yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penelitian yang dilakukan oleh Helmi & Daryanto (2020) disebutkan bahwa dengan membandingkan periode setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan pengembangan pembangunan infrastruktur Indonesia (periode 2015 – 2018) dengan periode sebelum Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan pengembangan pembangunan infrastruktur Indonesia (periode 2011 – 2014) yaitu dari sisi profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas perusahaan BUMN konstruksi masih dalam kategori sehat. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis rasio keuangan BUMN konstruksi yang dilakukan peneliti.

Dari penelitian yang dilakukan Utamaningsih & Muharis (2020) pada 4 (empat) perusahaan konstruksi BUMN di BEI untuk periode tahun 2015-2018 yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. terhadap profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas menunjukkan bahwa uji gross profit margin yang sangat baik, jauh di atas nilai standar industri sebesar 30%. Hasil uji solvabilitas dinilai dari nilai perbandingan total hutang terhadap total aset yang cenderung menurun dan nilai perbandingan total utang terhadap total ekuitas yang meningkat. Sebagian besar aset BUMN konstruksi dibiayai dari utang dan menurunkan nilai ekuitas perusahaan. Hal tersebut tidak didukung oleh likuiditas yang memadai, baik menurut analisis lancar maupun analisis kurang lancar.

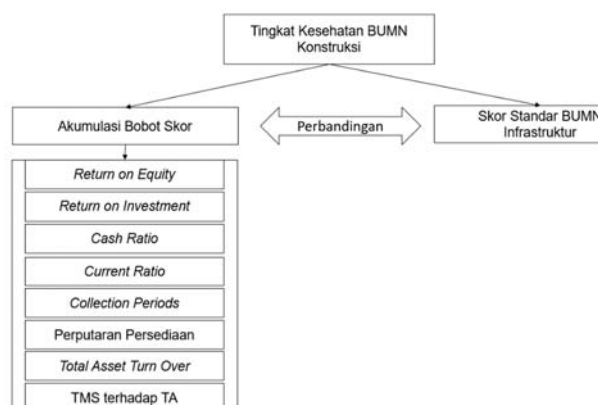
Penelitian yang dilakukan Resti (2021) menyimpulkan bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk, pada periode 2016-2019 mendapatkan predikat Kurang Sehat kategori BBB. Kinerja keuangan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, pada periode 2016-2019

menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan predikat Sehat kategori A, pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 perusahaan dengan tetap mendapat predikat Sehat kategori AA. Hasil penilaian kinerja keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, pada periode 2016-2019 menunjukkan bahwa perusahaan mendapat predikat Sehat kategori A pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 perusahaan mendapat predikat Kurang Sehat kategori BB. Hasil kinerja keuangan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, pada periode 2016-2019 menunjukkan bahwa perusahaan mendapat predikat Kurang Sehat kategori BBB.

Kerangka Pemikiran

Terdapat berbagai macam indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan BUMN, namun dalam penelitian ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 yang akan dibahas adalah menggunakan 8 indikator penilaian Kesehatan BUMN yang meliputi *return on equity*, *return on investment*, *cash ratio*, *current ratio*, *collection period*, *perputaran persediaan*, *total asset turn over*, dan *total modal sendiri (TMS) terhadap total asset (TA)*

Kedelapan indikator tersebut merupakan perhitungan kinerja keuangan yang dibobot dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002. Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran
Sumber: data yang diolah

3. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan teknik perbandingan atau komparasi. Menurut Supardi (2005), penelitian evaluasi (*evaluation research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar diperoleh umpan balik bagi upaya perbaikan perencanaan, sistem dan metode kerja yang telah dilakukan. Sementara itu, Kuncoro (2003) menyatakan bahwa penelitian evaluasi atau *evaluation research* merupakan penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan/mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Selanjutnya Arikunto (2010) menyatakan bahwa dengan adanya penelitian evaluatif, maka sebuah lembaga dapat ditingkatkan mutu kinerjanya, atau dengan kata lain, penelitian evaluatif ini bermanfaat dalam pengembangan kualitas atau *quality improvement*. Wirawan (2011) menyatakan bahwa evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan

Penelitian ini menggunakan model evaluasi kinerja keuangan terhadap populasi perusahaan BUMN konstruksi yang mendapatkan penugasan Pemerintah atau mengerjakan proyek strategis nasional periode tahun 2015 – 2021 dengan menggunakan standar yang telah ada yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002.

Unit analisis penelitian adalah kinerja keuangan perusahaan BUMN konstruksi yang meliputi 8 rasio, yaitu (1) *return on equity*, (2) *return on investment*, (3) *cash ratio*, (4) *current ratio*, (5) *collection period*, (6) *perputaran persediaan*, (7) *total asset turn over*, dan (8) *total modal sendiri (TMS) terhadap total asset (TA)*.

Tahapan analisis dimulai dari penentuan nilai 8 variabel rasio keuangan selama tahun pengamatan dan untuk masing-masing perusahaan.

Setelah nilai rasio didapat, langkah selanjutnya adalah memberi bobot sesuai ketentuan pada setiap perusahaan pada setiap waktu pengamatan. Hasil akhir dari analisis adalah

predikat kesehatan setiap perusahaan untuk setiap tahun.

Mengingat dalam penelitian ini objek yang dinilai merupakan BUMN Non Infrastruktur, maka metode penilaian indikator tersebut dinilai dan masing-masing bobotnya disebutkan dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 untuk BUMN non infrastruktur sebagai berikut:

Imbalan Kepada Pemegang Saham (*Return on Equity/ROE*)

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3 Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor Non Infra
15< ROE	20
13< ROE ≤15	18
11< ROE ≤13	16
9< ROE ≤11	14
7,9< ROE ≤9	12
6,6< ROE ≤7,9	10
5,3< ROE ≤6,6	8,5
4< ROE ≤5,3	7
2,5< ROE ≤4	5,5
1< ROE ≤2,5	4
0< ROE ≤1	2
ROE <0	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Imbalan Investasi (*Return On Investment/ROI*)

Tabel 2. 4 Daftar skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor Non Infra
18< ROI	15
15< ROI ≤18	13,5
13< ROI ≤15	12
12< ROI ≤13	10,5
10,5< ROI ≤12	9
9< ROI ≤10,5	7,5
7< ROI ≤9	6
5< ROI ≤7	5
3< ROI ≤5	4
1< ROI ≤3	3
0< ROI ≤1	2
ROI <0	1

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

1) Rasio Kas (*Cash ratio*)

Rasio Kas dirumuskan sebagai berikut:

Cash Ratio

$$= \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Tabel 2. 5 Daftar skor penilaian *cash ratio*

<i>Cash ratio</i> = X (%)	Skor Non Infra
X ≥35	5
25≤ X <35	4
15≤ X <25	3
10≤ X <15	2
5≤ X <10	1
0≤ X <5	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Rasio Lancar (Current ratio)

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6 Daftar skor penilaian *current ratio*

<i>Current ratio</i> = X (%)	Skor Non Infra
125≤ X	5
110≤ X <125	4
100≤ X <110	3
95≤ X <100	2
90≤ X <95	1
X <90	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Collection period

Collection period dirumuskan sebagai berikut.

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Tabel 2. 7 Daftar skor penilaian *collection period*

CP = X (hari)	Perbaikan = X (hari)	Skor Non Infra
X ≤ 60	X > 35	5
60 < X ≤ 90	30 < X ≤ 35	4,5
90 < X ≤ 120	25 < X ≤ 30	4
120 < X ≤ 150	20 < X ≤ 25	3,5
150 < X ≤ 180	15 < X ≤ 20	3
180 < X ≤ 210	10 < X ≤ 15	2,4
210 < X ≤ 240	6 < X ≤ 10	1,8
240 < X ≤ 270	3 < X ≤ 6	1,2
270 < X ≤ 300	1 < X ≤ 3	0,6
300 < X	0 < X ≤ 1	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan dirumuskan sebagai berikut.

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Tabel 2. 8 Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = X (hari)	Perbaikan = X (hari)	Skor Non Infra
X ≤ 60	35 < X	5
60 < X ≤ 90	30 < X ≤ 35	4,5
90 < X ≤ 120	25 < X ≤ 30	4
120 < X ≤ 150	20 < X ≤ 25	3,5
150 < X ≤ 180	15 < X ≤ 20	3
180 < X ≤ 210	10 < X ≤ 15	2,4
210 < X ≤ 240	6 < X ≤ 10	1,8
240 < X ≤ 270	3 < X ≤ 6	1,2
270 < X ≤ 300	1 < X ≤ 3	0,6
300 < X	0 < X ≤ 1	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

2) Perputaran Total Asset/ Total Asset Turn Over (TATO)

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Tabel 2. 9 Daftar skor penilaian TATO

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	Skor Non Infra
120 < X	20 < X	5
105 < X ≤ 120	15 < X ≤ 20	4,5
90 < X ≤ 105	10 < X ≤ 15	4
75 < X ≤ 90	5 < X ≤ 10	3,5
60 < X ≤ 75	0 < X ≤ 5	3
40 < X ≤ 60	X ≤ 0	2,5
20 < X ≤ 40	X < 0	2
X ≤ 20	X < 0	1,5

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Rasio Total Modal Sendiri (TMS) terhadap

Total Aset (TA)

$$TMS/TA = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2. 10 Kategori tingkat kesehatan BUMN

Sehat	AAA apabila total skor (TS) > 95
	AA apabila 80 < TS ≤ 95
	A apabila 65 < TS ≤ 80
Kurang sehat	BBB apabila 50 < TS ≤ 65
	BB apabila 40 < TS ≤ 50
	B apabila 30 < TS ≤ 40
Tidak Sehat	CCC apabila 20 < TS ≤ 30
	CC apabila 10 < TS ≤ 20
	C apabila TS ≤ 10

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Dari hasil penilaian skor dan kategori tersebut, selanjutnya dapat diketahui masing-masing tingkat kesehatan BUMN dilihat dari aspek keuangan.

Tabel 2. 11 Kategori tingkat kesehatan BUMN

Sehat	AAA apabila total skor (TS) > 95
	AA apabila 80 < TS ≤ 95
	A apabila 65 < TS ≤ 80
Kurang sehat	BBB apabila 50 < TS ≤ 65
	BB apabila 40 < TS ≤ 50
	B apabila 30 < TS ≤ 40
Tidak Sehat	CCC apabila 20 < TS ≤ 30
	CC apabila 10 < TS ≤ 20
	C apabila TS ≤ 10

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Penilaian kinerja keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) adalah sebagai berikut.

Return On Equity

Return on equity (ROE) atau Rasio Imbalan kepada pemegang saham merupakan rasio yang didapatkan dari hasil bagi antara laba setelah pajak WSKT dengan modal sendiri WSKT. Hasil perhitungan rasio ROE pada WSKT disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan ROE WSKT

Keterangan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laba setelah Pajak (Rp T)	1.05	1.81	4.20	4.62	1.03	-9.50	-1.84
Modal sendiri (Rp T)	9.70	16.77	22.75	28.89	29.12	16.58	15.46
ROE (%)	10.82	10.79	18.46	15.99	3.53	-57.27	-11.89

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan ROE pada Tabel 4.1, WSKT memiliki rasio ROE yang cenderung stabil di tahun 2015-2016 yang mana di tahun 2016 WSKT mencatatkan laba setelah pajak yang lebih besar di dibanding tahun 2015 dan diiringi dengan naiknya modal sendiri yang mencapai sebesar Rp16,77 T di 2016. Di tahun 2017 dan 2018, WSKT menghasilkan ROE dengan nilai yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 yaitu masing-masing sebesar 18,46% (2017) dan 15,99% (2018). Di tahun 2019, WSKT mulai mengalami penurunan laba setelah pajak hingga mencapai sebesar Rp1,03 T namun tidak diiringi dengan penurunan modal sendiri sehingga berdampak pada penurunan nilai ROE di tahun 2019 menjadi sebesar 3,53%. Di tahun 2020 dan 2021 WSKT yang mencatatkan penurunan nilai ROE yang sangat signifikan dibandingkan ROE di 5 tahun sebelumnya hingga mencapai -57,27% di tahun 2020 dan -11,89% di tahun 2021. Penurunan yang sangat signifikan tersebut disebabkan karena terdapat penurunan laba

setelah pajak WSKT yang sangat tajam (mencatatkan negatif) sedangkan pada modal sendiri juga mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan.

Dengan menggunakan hasil perhitungan ROE pada tabel 4.1 tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil ROE dikonversikan dalam bobot skor non infrastruktur sehingga didapatkan tabel berikut.

Tabel 4. 2 Bobot skor ROE WSKT

Tahun	ROE %	Range ROE	Bobot
2015	10.82	9%<ROE<=11%	14
2016	10.79	9%<ROE<=11%	14
2017	18.46	>15%	20
2018	15.99	>15%	20
2019	3.53	2,5%<ROE<=4%	5.5
2020	-57.27	<0%	0
2021	-11.89	<0%	0

Sumber: Diolah oleh penulis

Return On Investment

Return On Investment (ROI) atau Rasio Imbalan Investasi (ROI) merupakan rasio yang didapatkan dari hasil bagi antara EBIT (Earning Before Interest Tax) ditambah beban penyusutan WSKT dengan *capital employed* WSKT. Hasil perhitungan ROI WSKT disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Hasil perhitungan ROI WSKT

Keterangan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EBIT (Rp T)	1.44	3.14	6.52	7.96	5.24	-3.50	4.07
Penyusutan (Rp T)	0.14	0.19	0.52	0.63	0.60	0.72	0.60
Total EBIT dan Penyusutan (Rp T)	1.58	3.33	7.04	8.59	5.84	-2.78	4.67
Capital employed (Rp T)	28.40	58.42	93.15	117.3	113.93	98.31	98.19
ROI (%)	5.56	5.70	7.56	7.32	5.13	-2.83	4.76

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan ROI WSKT pada tabel 4.3, setiap peningkatan total EBIT dan penyusutan diikuti dengan peningkatan *capital employed*, begitu juga sebaliknya. Di tahun 2015 dan 2016 WSKT mencatatkan ROI yang stabil yaitu dengan nilai masing-masing sebesar 5,56% dan 5,70%. Di tahun 2017 ROI WSKT mengalami peningkatan

menjadi sebesar 7,56%, namun kembali mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing ROI sebesar 7,32% dan 5,13%. Pada tahun 2020, ROI WSKT mengalami penurunan tajam hingga mencapai -2,83%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan yang signifikan dari EBIT di tahun 2020 yang mencatatkan rugi hingga mencapai -Rp3,50 T sedangkan disisi lain *capital employed* cenderung masih tinggi. Selanjutnya di tahun 2021 ROI WSKT kembali membaik mencapai 4,76%, namun masih di bawah nilai rata-rata rasio ROI di periode 2015-2019.

Dengan menggunakan hasil perhitungan ROI pada tabel 4.3 tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil ROI dikonversikan dalam bobot skor non infrastruktur sehingga didapatkan Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Bobot skor ROI WSKT

Tahun	ROI (%)	Range ROI	Bobot
2015	5.56	5%<ROI≤7%	5
2016	5.70	5%<ROI≤7%	5
2017	7.56	7%<ROI≤9%	6
2018	7.32	7%<ROI≤9%	6
2019	5.13	5%<ROI≤7%	5
2020	-2.83	<0%	1
2021	4.76	3%<ROI≤5%	4

Sumber: Diolah oleh penulis

Cash ratio

Cash ratio atau rasio kas merupakan rasio yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah kas dan setara kas WSKT (kas, bank, dan surat berharga jangka pendek) dengan *current liabilities* (kewajiban jangka pendek) WSKT. Hasil perhitungan atas *cash ratio* WSKT disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Hasil perhitungan *cash ratio* WSKT

Keterangan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kas (Rp T)	5.50	10.65	6.08	10.84	9.26	1.21	13.16
Bank (Rp T)	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Jangka Pendek (Rp T)	0.01	-	-	-	-	0.24	0.04
Total Kas, Bank dan Surat Berharga Jangka Pendek (Rp T)	5.51	10.65	6.08	10.84	9.26	1.45	13.20

Current Liabilities (Rp T)	13.60	31.28	52.31	56.80	45.02	48.56	27.30
Cash ratio (%)	40.51	34.05	11.62	19.08	20.57	2.99	48.35

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan *cash ratio* pada Tabel 4.5, WSKT mencatatkan *cash ratio* yang cenderung masih rendah di tahun 2015 yaitu sebesar 40,51%. Di tahun berikutnya yaitu 2016 dan 2017, WSKT mengalami penurunan *cash ratio* yang cukup signifikan dikarenakan meningkatnya *current liabilities* yang cukup tinggi di tahun 2016 dan 2017 namun tidak diiringi kenaikan kas dan setara kas yang cukup. Di tahun 2018, WSKT mencatatkan kenaikan *cash ratio* yang berturut-turut hingga tahun 2019 namun tidak terlalu signifikan. Nilai *cash ratio* di tahun 2018 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 19,08% dan 20,57%. Pada tahun 2020, terjadi penurunan kas dan setara kas yang sangat signifikan yang menyebabkan *cash ratio* turun sangat rendah yaitu hanya sebesar 2,99%. Nilai *cash ratio* di tahun 2020 tersebut merupakan nilai terendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya periode 2015-2019. Namun di tahun 2021 *cash ratio* kembali meningkat tajam karena meningkatnya kas dan setara kas serta menurunnya nilai *current liabilities* di periode tersebut. Secara keseluruhan, dari tahun 2015 hingga 2021, WSKT tidak memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tunai karena hasil dari *cash ratio* WSKT tahun 2015-2021 masih di bawah 100%.Zx8

Dengan menggunakan hasil perhitungan *cash ratio* pada tabel 4.5 tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil *cash ratio* dikonversikan dalam bobot skor non infrastruktur sehingga didapatkan Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Bobot skor *cash ratio* WSKT

Tahun	Cash ratio (%)	Range Cash Ratio (X)	Bobot
2015	40.51	⇒35%	5
2016	34.05	25%≤X<35%	4
2017	11.62	10%≤X<15%	2
2018	19.08	15%≤X<25%	3
2019	20.57	15%≤X<25%	3
2020	2.99	0%≤X<5%	0
2021	48.35	≥35%	5

Sumber: Diolah oleh penulis

Current ratio

Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio yang didapatkan dari hasil bagi antara *current asset* (aset lancar) WSKT dengan *current liabilities* (kewajiban jangka pendek) WSKT. Hasil perhitungan atas *current ratio* WSKT disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Hasil perhitungan *current ratio* WSKT

Keterangan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Current Asset (Rp T)	15.80	39.71	52.42	66.99	49.03	28.75	42.58
Current Liabilities (Rp T)	13.60	31.28	52.31	56.80	45.02	48.56	27.30
<i>Current ratio</i> (%)	116.18	126.95	100.21	117.94	108.91	59.21	155.97

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan *current ratio* pada Tabel 4.7, WSKT mencatatkan *current ratio* yang cukup stabil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu masih di atas 100%. Namun di tahun 2020, WSKT mencatatkan penurunan *current ratio* dengan nilai sebesar 59,21% yang disebabkan karena penurunan current asset menjadi Rp28,75 T (dibanding tahun 2019 sebesar Rp49,03 T) sedangkan current liabilities sebaliknya yaitu meningkat dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2021, WSKT kembali mencatatkan current asset di atas 100% yaitu dengan nilai sebesar 155,97% dikarenakan kenaikan dari current asset dan penurunan dari current liabilities. Secara keseluruhan dari tahun 2015 hingga 2021, secara umum WSKT memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar perusahaan, kecuali di tahun 2020 yang masih di bawa 100%.

Dengan menggunakan hasil perhitungan *current ratio* pada tabel 4.7 tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil *current ratio* dikonversikan dalam bobot skor non infrastruktur sehingga didapatkan Tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Bobot skor *current ratio* WSKT

Tahun	<i>Current ratio</i> (%)	Range Current Ratio (X)	Bobot
2015	116.18	$110\% \leq X < 125\%$	4
2016	126.95	$\geq 125\%$	5

2017	100.21	$100\% \leq X < 110\%$	3
2018	117.94	$110\% \leq X < 125\%$	4
2019	108.91	$100\% \leq X < 110\%$	3
2020	59.21	$\leq 90\%$	0
2021	155.97	$\geq 125\%$	5

Sumber: Diolah oleh penulis

Collection period

Collection period merupakan hasil bagi dari total piutang usaha WSKT dengan total pendapatan usaha WSKT. Hasil perhitungan atas *collection period* WSKT disajikan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Hasil perhitungan *collection period* WSKT

Keterangan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Piutang Usaha (Rp T)	1.62	4.31	1.86	3.76	3.55	3.56	2.90
Total Pendapatan Usaha (Rp T)	14.15	23.79	45.21	48.79	31.39	16.19	12.22
<i>Collection period</i> (hari)	41.79	66.13	15.02	28.13	41.28	80.26	86.59

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan *collection period* pada Tabel 4.9, WSKT mencatatkan rata-rata waktu *collection period* pada tahun 2015 sebesar 41,79 hari. Di tahun 2016 terjadi peningkatan piutang usaha namun tidak seimbang dengan persentase kenaikan total pendapatan usaha sehingga menyebabkan meningkatnya waktu *collection period* menjadi 66,13 hari. Di tahun 2017 terdapat perbaikan waktu *collection period* hingga mencapai 15,02 hari yang disebabkan karena terdapat penurunan nilai piutang usaha dan meningkatnya pendapatan usaha di tahun 2017. Selanjutnya di tahun 2018 hingga 2021 terdapat kenaikan waktu *collection period* dikarenakan piutang usaha yang cenderung tetap dan di sisi lain terjadi penurunan pendapatan usaha setiap tahunnya.

Dengan menggunakan hasil perhitungan *collection period* pada Tabel 4.9, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil *collection period* dikonversikan dalam bobot skor non infrastruktur sehingga didapatkan Tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Bobot skor *collection period* WSKT

Tahun	Collection period (hari)	Perbaikan (hari)	Range CP (hari)	Range Perbaikan (hari)	Bobot
2015	41.79		<60		5
2016	66.13	-24.34	60<X<=90		4.5
2017	15.02	51.11	<60	>35	5
2018	28.13	-13.11	<60		5
2019	41.28	-13.15	<60		5
2020	80.26	-38.98	60<X<=90		4.5
2021	86.59	-6.33	60<X<=90		4.5

Sumber: Diolah oleh penulis

Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan merupakan hasil bagi dari total persediaan WSKT dengan total pendapatan usaha WSKT. Hasil perhitungan atas perputaran persediaan WSKT disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil perhitungan perputaran persediaan WSKT

Keterangan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Persediaan (Rp T)	0.80	2.55	3.23	5.09	4.47	3.82	4.35
Total Pendapatan Usaha (Rp T)	14.15	23.79	45.21	48.79	31.39	16.19	12.22
Perputaran Persediaan (hari)	20.64	39.12	26.08	38.08	51.98	86.12	129.89

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan perputaran persediaan pada Tabel 4.11, WSKT mencatatkan rata-rata waktu perputaran persediaan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah 20,64 hari dan 39,12 hari. Di tahun 2017 WSKT mencatatkan perbaikan perputaran persediaan dengan rata-rata waktu menjadi 26,08 hari yang disebabkan karena persentase kenaikan total pendapatan usaha leboh besar dari pada persentase kenaikan persediaan di tahun tersebut. Di tahun 2018 hingga 2021, perputaran persediaan terus meningkat hingga mencapai rata-rata waktu tertinggi yaitu 129,89 hari di tahun 2021. Kenaikan perputaran persediaan tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan pendapatan usaha setiap tahunnya namun tidak diimbangi dengan penurunan total persediaan.

Dengan menggunakan hasil perhitungan perputaran persediaan pada Tabel 4.11 tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil perputaran persediaan dikonversikan dalam bobot skor non infrastruktur sehingga didapatkan Tabel 4.12.

Tabel 4. 12 Bobot skor perputaran persediaan WSKT

Tahun	PP (hari)	Perbaikan (hari)	Range PP (hari)	Range Perbaikan (hari)	Bobot
2015	20.64		<=60		5
2016	39.12	-18.49	<=60		5
2017	26.08	13.05	<=60	10<X<=15	5
2018	38.08	-12.00	<=60		5
2019	51.98	-13.90	<=60		5
2020	86.12	-34.14	60<X<=90		4.5
2021	129.89	-43.77	120<X<=150		3.5

Sumber: Diolah oleh penulis

Total Asset Turn Over

Total Asset Turn Over (TATO) atau perputaran total aset merupakan rasio yang didapatkan dari hasil bagi antara total pendapatan WSKT dengan *capital employed* WSKT. Hasil perhitungan atas TATO WSKT disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4. 13 Hasil perhitungan TATO WSKT

Keterangan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Pendapatan (Rp T)	14.15	23.79	45.21	48.79	31.39	16.19	12.22
Capital employed (Rp T)	28.40	58.42	93.15	117.30	113.93	98.31	98.19
TATO (%)	49.82	40.72	48.53	41.59	27.55	16.47	12.45

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan TATO pada Tabel 4.13, WSKT mencatatkan TATO di tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 49,82% dan 40,72%. Di tahun 2017 WSKT mencatatkan perbaikan TATO dengan kenaikan mencapai 7,81% sehingga nilai TATO di tahun 2017 adalah sebesar 48,53%. Hal tersebut disebabkan karena persentase kenaikan total pendapatan lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan *capital employed* di tahun 2017. Di tahun 2018 hingga 2021, TATO terus mengalami penurunan setiap tahunnya hingga mencapai nilai terendah di tahun 2021 yaitu sebesar 12,45%. Penurunan TATO dari tahun 2018 hingga 2021 disebabkan karena adanya penurunan pendapatan WSKT dan tidak diiringi dengan penurunan *capital employed* yang terjadi berturut-turut setiap tahunnya.

Dengan menggunakan hasil perhitungan TATO pada Tabel 4.13 tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil TATO dikonversikan dalam bobot skor non infrastruktur sehingga didapatkan Tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Bobot skor TATO WSKT

Tahun	TATO (%)	Perbaikan (%)	Range TATO (%)	Range Perbaikan (%)	Bobot
2015	49.82		$40 < X \leq 60$		2.5
2016	40.72	-9.10	$40 < X \leq 60$		2.5
2017	48.53	7.81	$75 < X \leq 90$	$5 < X \leq 10$	3.5
2018	41.59	-6.94	$40 < X \leq 60$		2.5
2019	27.55	-14.04	$20 < X \leq 40$		2
2020	16.47	-11.08	≤ 20		1.5
2021	12.45	-4.02	≤ 20		1.5

Sumber: Diolah oleh penulis

Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Total Modal Sendiri (TMS) terhadap Total Aset (TA) merupakan rasio yang didapatkan dari hasil bagi antara total modal sendiri WSKT dengan total aset WSKT.

Berdasarkan hasil perhitungan TMS terhadap TA pada Tabel 4.15, WSKT mencatatkan TMS terhadap TA di tahun 2015 dan 2016 dengan nilai masing-masing sebesar 32,01% dan 27,30%. Di tahun 2017 hingga 2019 WSKT mencatatkan TMS terhadap TA stabil di kisaran nilai 23%. Hal tersebut disebabkan kenaikan total aset di tahun 2017 hingga 2019 dan diiringi dengan kenaikan modal sendiri di tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2020 dan 2021 nilai TMS terhadap TA mengalami penurunan dengan nilai masing-masing sebesar 15,70% dan 14,92%. Penurunan nilai TMS terhadap TA disebabkan karena persentase penurunan modal sendiri lebih besar dibandingkan dengan persentase total aset di tahun 2020 dan 2021.

Dengan menggunakan hasil perhitungan TMS terhadap TA pada Tabel 4.15 tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil TMS terhadap TA dikonversikan dalam bobot skor non infrastruktur sehingga didapatkan Tabel 4.16.

Tabel 4. 15 Bobot skor TMS terhadap TA WSKT

Tahun	TMS terhadap TA (%)	Range TMS terhadap TA (%)	Bobot
2015	32.01	$30 \leq X < 40$	10
2016	27.30	$20 \leq X < 30$	7.25
2017	23.24	$20 \leq X < 30$	7.25
2018	23.23	$20 \leq X < 30$	7.25
2019	23.75	$20 \leq X < 30$	7.25
2020	15.70	$10 \leq X < 20$	6
2021	14.92	$10 \leq X < 20$	6

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil Penilaian Kinerja Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Berdasarkan mekanisme penilaian tingkat kesehatan aspek keuangan yang ditetapkan pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP 100/MBU/2002 dan hasil perhitungan bobot pada setiap indikator WSKT periode tahun 2015-2021, didapatkan akumulasi bobot yang kemudian dibandingkan dengan bobot standar yaitu sebesar 50. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk skor yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan keuangan WSKT sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.17.

Tabel 4. 16 Hasil penilaian tingkat kesehatan WSKT tahun 2015-2021

No.	Indikator	Bobot						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	ROE	14	14	20	20	5.5	0	0
2	ROI	5	5	6	6	5	1	4
3	Cash Ratio	5	4	2	3	3	0	5
4	Current Ratio	4	5	3	4	3	0	5
5	Collection Periods	5	4.5	5	5	5	4.5	4.5
6	Perputaran Persediaan	5	5	5	5	5	4.5	3.5
7	TATO	2.5	2.5	3.5	2.5	2	1.5	1.5
8	TMS terhadap TA	10	7.25	7.25	7.25	7.25	6	6
Akumulasi Bobot		50.5	47.3	51.75	52.8	35.8	17.5	29.5
Skor		72.1	67.5	73.93	75.4	51.1	25	42.1
Tingkat Kesehatan		A	A	A	A	BBB	CCC	BB

Sumber: Diolah oleh penulis

Pada Tabel 4.17 tersebut, WSKT memiliki tingkat kesehatan yang berbeda-beda setiap tahunnya. WSKT mendapat tingkat kesehatan "A" di tahun 2015 hingga 2018 yang dikategorikan sebagai BUMN yang Sehat (sesuai tabel 4.18) karena mencatatkan skor yang cukup baik yaitu berada di range $65 < TS \leq 80$.

Pada tahun 2019 dan 2021 masing-masing memiliki tingkat kesehatan “BBB” dan “BB” yang dapat dikategorikan sebagai BUMN Kurang Sehat karena dampak dari penurunan bobot pada beberapa indikator dimana paling signifikan terjadi pada bobot skor ROE. Tingkat kesehatan WSKT yang paling rendah di antara periode 2015-2021 adalah di tahun 2020 yang memiliki tingkat kesehatan “CCC” dan dapat dikategorikan sebagai BUMN Tidak Sehat karena mendapatkan akumulasi bobot terendah yaitu hanya 17,5 dari bobot maksimal 70. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penurunan bobot di semua indikator yang mana 3 di antaranya mendapat skor 0 yaitu pada ROE, *cash ratio*, dan *current ratio*.

Tabel 4.18 memnunjukkan kategori Kesehatan atau peringkat PT Waskita karya.

Tabel 4. 17 Kategori kesehatan WSKT tahun 2015-2021

Tahun	Tingkat Kesehatan	Kategori
2015	A	SEHAT
2016	A	KURANG SEHAT
2017	A	SEHAT
2018	A	SEHAT
2019	BBB	KURANG SEHAT
2020	CCC	TIDAK SEHAT
2021	BB	KURANG SEHAT

Sumber: Diolah oleh penulis

Dengan teknik yang sama dapat disusun tabel yang berisi rangkuman tingkat kesehatan seluruh obyek atau sampel penelitian.

Tingkat Kesehatan PT Wijaya Karya

Berdasarkan mekanisme penilaian tingkat kesehatan aspek keuangan yang ditetapkan pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP 100/MBU/2002 dan hasil perhitungan bobot pada setiap indikator WKA periode tahun 2015-2021, didapatkan akumulasi bobot yang kemudian dibandingkan dengan bobot standar yaitu sebesar 50. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk skor yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan keuangan WKA sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 18 Hasil penilaian tingkat kesehatan WKA tahun 2015-2021

No.	Indikator	Bobot						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	ROE	16	14	14	16	18.5	4	4
2	ROI	7.5	5	5	5	6	4	3
3	Cash Ratio	3	5	5	5	4	4	3
4	Current Ratio	4	5	5	5	5	3	3
5	Collection Period	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5
6	Perputaran Persediaan	5	5	5	4.5	4	1.8	1.8
7	TATO	3.5	2.5	3.5	2.5	2.5	2	3
8	TMS terhadap TA	7.25	9	10	7.25	10	7.25	7.25
Akumulasi Bobot		50.75	50	52	47.25	54.5	31.05	30.05
Skor		72.5	71.43	74.29	67.5	77.86	44.36	42.93
Tingkat Kesehatan		A	A	A	A	A	BB	BB

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan mekanisme penilaian tingkat kesehatan aspek keuangan yang ditetapkan pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP 100/MBU/2002 dan hasil perhitungan bobot pada setiap indikator ADHI periode tahun 2015-2021, didapatkan akumulasi bobot yang kemudian dibandingkan dengan bobot standar yaitu sebesar 50. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk skor yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan keuangan ADHI sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 19 Hasil penilaian tingkat kesehatan ADHI tahun 2015-2021

No.	Indikator	Bobot						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	ROE	12	8.5	12	14	14	2	4
2	ROI	5	4	5	4	4	3	3
3	Cash Ratio	5	4	3	3	2	1	2
4	Current Ratio	5	5	5	5	4	4	3
5	Collection Periods	4.5	4	4.5	4.5	4	4	4.5
6	Perputaran Persediaan	5	4.5	4.5	4	4	1.8	1.8
7	TATO	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2
8	TMS terhadap TA	10	7.25	7.25	7.25	6	6	6
Akumulasi Bobot		49	39.75	43.75	44.25	40.5	23.8	26.3
Skor		70	56.79	62.5	63.21	57.86	34	37.57
Tingkat Kesehatan		A	BBB	BBB	BBB	BBB	B	B

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan mekanisme penilaian tingkat kesehatan aspek keuangan yang ditetapkan pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP 100/MBU/2002 dan hasil perhitungan bobot pada setiap indikator PTPP periode tahun 2015-2021, didapatkan akumulasi bobot yang kemudian dibandingkan dengan bobot standar yaitu sebesar 50. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk skor yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan keuangan PTPP sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 20 Hasil penilaian tingkat kesehatan PTPP tahun 2015-2021

No.	Indikator	Bobot						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	ROE	20	14	16	16	10	4	5.5
2	ROI	7.5	5	6	6	4	4	4
3	Cash Ratio	4	5	5	4	4	4	3
4	Current Ratio	5	5	5	5	5	4	4
5	Collection Period	4.5	4	4	3.5	3	5	4
6	Perputaran Persediaan	4.5	4.5	5	4.5	4	2.4	1.8
7	TATO	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2
8	TMS terhadap TA	7.25	10	10	10	7.25	7.25	7.25
Akumulasi Bobot		56.3	50	53.5	51.5	39.75	32.65	31.55
Skor		80.4	71.43	76.43	73.57	56.79	46.64	45.07
Tingkat Kesehatan		AA	A	A	A	BBB	BB	BB

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan mekanisme penilaian tingkat kesehatan aspek keuangan yang ditetapkan pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP 100/MBU/2002 dan hasil perhitungan bobot pada setiap indikator PTHK periode tahun 2015-2021, didapatkan akumulasi bobot yang kemudian dibandingkan dengan bobot standar yaitu sebesar 50. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk skor yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan keuangan PTHK sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 21 Hasil penilaian tingkat kesehatan PTHK tahun 2015-2021

No.	Indikator	Bobot						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	ROE	7	5.5	16	20	16	0	0
2	ROI	4	3	4	4	4	3	3
3	Cash Ratio	5	5	5	4	5	4	5
4	Current Ratio	5	5	3	0	3	0	3
5	Collection Period	4.5	5	5	5	5	5	5

6	Perputaran Persediaan	4.5	5	5	5	5	5	5
7	TATO	2.5	2	2	3	2	2	1.5
8	TMS terhadap TA	9	10	6	6	7.25	7.25	9
Akumulasi Bobot		41.5	40.5	46	47	47.25	26.25	31.5
Skor		59.3	57.86	65.71	67.14	67.5	37.5	45
Tingkat Kesehatan		BBB	BBB	A	A	A	B	BB

Sumber: Diolah oleh penulis

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari penilaian tingkat kesehatan BUMN Konstruksi yang mengerjakan proyek strategis nasional atau mendapat penugasan dari Pemerintah khususnya untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kesehatan BUMN Konstruksi yang ditinjau dari aspek keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Penelitian terdiri dari 5 sampel BUMN Konstruksi yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero) dengan periode penelitian dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan hasil analisis dan pembahasan sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

WSKT mendapatkan hasil tingkat kesehatan yang berbeda-beda selama periode 2015-2021. WSKT mendapatkan tingkat kesehatan paling baik di tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan hasil "A" dan dikategorikan sebagai BUMN Sehat. Di tahun 2019 WSKT mengalami penurunan tingkat kesehatan dan mendapatkan hasil "BBB" yang dikategorikan BUMN Kurang Sehat. Di tahun 2020 WSKT kembali mengalami penurunan tingkat kesehatan karena adanya pengaruh negatif dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perolehan hasil tingkat kesehatan menjadi "CCC" atau dikategorikan sebagai BUMN Tidak Sehat. Di tahun 2021, WSKT mengalami sedikit perbaikan dari tingkat kesehatan dari tahun sebelumnya yakni mendapat hasil "BB" yang dikategorikan sebagai BUMN Kurang Sehat.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Selama periode 2015 hingga 2021, WIKA mendapatkan hasil penilaian tingkat kesehatan yang baik di 5 tahun pertama yakni tahun 2015-2019 dengan hasil secara berturut-turut diperoleh “A” atau dikategorikan sebagai BUMN Sehat. Memasuki masa pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020 dan 2021, WIKA mendapatkan penurunan tingkat kesehatan “BB” di tahun 2020 dan tahun 2021. Kedua hasil tingkat kesehatan WIKA di tahun 2020 dan 2021 dikategorikan sebagai BUMN Kurang Sehat karena pengaruh negatif dari pandemi Covid-19.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Tingkat kesehatan ADHI di tahun 2015 mendapat hasil yang baik yakni “A” dengan kategori BUMN Sehat. Di tahun selanjutnya ADHI secara berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2019 mendapatkan hasil tingkat kesehatan “BBB” yang dikategorikan sebagai BUMN Kurang Sehat. Memasuki masa pandemi Covid-19 yakni tahun 2020 dan 2021, ADHI kembali mengalami penurunan tingkat kesehatan dengan hasil masing-masing adalah “B” yang dikategorikan BUMN Kurang Sehat. Meskipun periode 2016-2019 dan periode 2020-2021 memiliki kategori yang sama yakni BUMN Kurang Sehat, namun skor dan tingkat kesehatan ADHI di periode 2016-2019 lebih baik dibandingkan periode tahun tahun 2020-2021. Penurunan tingkat kesehatan ADHI di tahun 2020-2021 karena pengaruh negatif dari pandemi Covid-19.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Tingkat kesehatan PTPP periode tahun 2015-2021 memiliki tren penurunan. Di tahun 2015 PTPP mendapatkan hasil “AA” yang dikategorikan sebagai BUMN Sehat. Selanjutnya di tahun 2016 hingga tahun 2018 PTPP mendapatkan hasil “A” yang juga dikategorikan sebagai BUMN Sehat. Di tahun 2019, ADHI mengalami penurunan tingkat kesehatan sehingga mendapatkan BBB atau dikategorikan sebagai BUMN Kurang Sehat. Memasuki masa pandemi Covid-19 yakni tahun 2020 dan 2021, ADHI kembali mengalami

penurunan tingkat kesehatan dengan mendapatkan hasil masing-masing “BB” secara berturut-turut yang dikategorikan sebagai BUMN Kurang Sehat. Meskipun di tahun 2019 dan tahun 2020-2021 memiliki kategori kesehatan yang sama, namun nilai skor dan tingkat kesehatan 2019 lebih baik dibandingkan tahun 2020-2021. Penurunan tingkat kesehatan PTPP di tahun 2020 dan 2021 tersebut terjadi karena pengaruh negatif dari Covid-19.

PT Hutama Karya (Persero)

Tingkat kesehatan PTHK di tahun 2015-2019 mengalami tren perbaikan dimana di tahun 2015-2016 PTHK mendapatkan hasil “BBB” yang dikategorikan sebagai BUMN Kurang Sehat, sedangkan di tahun 2017-2019 PTHK mendapatkan perbaikan tingkat kesehatan dengan hasil “A” yang dikategorikan sebagai BUMN Sehat. Memasuki masa pandemi Covid-19 yakni tahun 2020 dan 2021, PTHK mengalami penurunan tingkat kesehatan yakni “B” di tahun 2020 dan “BB” di tahun 2021 dimana keduanya dikategorikan sebagai BUMN Kurang Sehat. Penurunan tingkat kesehatan yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena pengaruh negatif dari Pandemi Covid-19.

Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas hanya melihat kondisi keuangan 5 BUMN Konstruksi selama periode 7 tahun terakhir yaitu 2015-2021 sehingga belum dapat menggambarkan keseluruhan hasil.
2. Indikator penilaian yang digunakan sebatas yang diatur pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002.
3. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan metode kuantitatif sehingga belum secara komprehensif melihat seluruh aspek yang dapat mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Rekomendasi

Setelah adanya penelitian tingkat kesehatan BUMN Konstruksi periode tahun 2015-2021, peneliti harapkan diantaranya:

1. Pihak manajemen BUMN Konstruksi perlu mengevaluasi secara intensif terkait kebijakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan indikator penilaian kinerja keuangan khususnya yang mendapat bobot penilaian yang masih rendah. Dengan pemilihan kebijakan yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan indikator penilaian kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
2. Pemerintah yang memberikan penugasan kepada BUMN Konstruksi perlu memperhatikan dan mengevaluasi kondisi kesehatan BUMN Konstruksi serta mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan BUMN Konstruksi dalam mengerjakan proyek Pemerintah atau proyek strategis nasional. Dalam menjalankan penugasan, peran Pemerintah sangat penting dalam mendukung pelaksanaan proyek BUMN Konstruksi baik dari sisi fiskal maupun regulasi.

Penilaian tingkat kesehatan pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 belum menggambarkan rasio solvabilitas BUMN Konstruksi, sehingga menurut penulis perlu adanya penyesuaian peraturan yang mengatur terkait penambahan rasio solvabilitas untuk mengevaluasi risiko pendanaan BUMN Konstruksi dan dapat menggambarkan tingkat kesehatan BUMN secara keseluruhan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Atmaja, L. S. (2008). *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono, & Ashari. (2005). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Gebang, A. A. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Helmi, A., & Daryanto, W. M. (2020). Financial Performance and Health Assessment Analysis and Measurement of State Owned Enterprise (SOE) Construction Companies Listed in Indonesia Stock Exchange Before and After the Government of Indonesia Infrastructure Development Boom in 2014/2015. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 19-36.
- Husnan, S. (2013). *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Pendek*. Yogyakarta: BPFE.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kemenkeu. (2018). *APBN 2017*. Diakses dari Kemenkeu: <https://web.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Kemenkeu. (2019). *APBN 2018*. Diakses dari Kemenkeu: <https://web.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Kemenkeu. (2020). *APBN 2019*. Diakses dari Kemenkeu: <https://web.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kemenkeu. (2021). *APBN 2020*. Diakses dari Kemenkeu: <https://web.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Kemenkeu. (2022). *APBN 2021*. Diakses dari Kemenkeu: <https://web.kemenkeu.go.id/apbn2021>
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, J. R., Saladin, H., & Arifin, M. A. (2022). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 213-223.
- Maryati. (2010). *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.

- Munawir, S. (2005). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Ke-Empat ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Prawirosentono, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (2016-2022). *Laporan Tahunan 2015-2021*. Jakarta: PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- PT Utama Karya (Persero). (2016-2022). *Laporan Tahunan 2015-2021*. Jakarta: PT Utama Karya (Persero).
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (2016-2022). *Laporan Tahunan 2015-2021*. Jakarta: PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (2016-2022). *Laporan Tahunan 2015-2021*. Jakarta: PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2016-2022). *Laporan Tahunan 2015-2021*. Jakarta: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- Resti, A. A. (2021). Penilaian Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan BUMN Bidang Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Management and Business Review*, 379-391.
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudarmo, I. G. (2013). *Pengantar Bisnis* (Edisi Ke-Dua ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Suwatno, & Priansa, D. J. (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tertia, A. H., & Subdroto, W. T. (2021). The Influence of the Covid-19 Pandemic on the Financial Performance of Construction SOEs Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 137-145.
- Utamaningsih, A., & Muharis, C. (2020). Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Konstruksi BUMN Periode 2015-2018. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 75-86.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standard, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada